



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN



# Laporan Kinerja Tahun 2024

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Stasiun KIPM Pontianak pada Tahun 2024.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Pontianak Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Pontianak selama Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Tahun 2024.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Pontianak, 21 Januari 2025

Kepala Stasiun KIPM Pontianak



Jimmy Y. Elwaren

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....</b>	<b>1</b>
<b>1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Sistematika Penyajian .....</b>	<b>6</b>
<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Sasaran .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Indikator dan Target Kinerja .....</b>	<b>9</b>
<b>2.3 Pengukuran Kinerja .....</b>	<b>10</b>
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>11</b>
<b>3.1 Capaian Kinerja.....</b>	<b>10</b>
<b>3.2 Analisis dan Evaluasi .....</b>	<b>12</b>
<b>3.3 Realisasi Anggaran.....</b>	<b>37</b>
<b>Penutup.....</b>	<b>37</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>37</b>
<b>4.2 Rekomendasi .....</b>	<b>38</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja SKIPM Pontianak 2024.....	9
Tabel 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024.....	11
Tabel 3 Target dan Realisasi IK 1 .....	14
Tabel 4 Target dan Realisasi IK 2 .....	16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK 3 .....	17
Tabel 6 Target dan Realisasi IK 4 .....	19
Tabel 7 Target dan Realisasi IK 5 .....	22
Tabel 8 Target dan Realisasi IK 6 .....	23
Tabel 9 Target dan Realisasi IK 7 .....	27
Tabel 10 Target dan Realisasi IK 8 .....	28
Tabel 11 Target dan Realisasi IK 9 .....	30
Tabel 12 Target dan Realisasi IK 10 .....	31
Tabel 13 Target dan Realisasi IK 11 .....	32
Tabel 14 Target dan Realisasi IK 12 .....	33
Tabel 15 Target dan Realisasi IK 13 .....	35
Tabel 16 Target dan Realisasi IK 14 .....	36
Tabel 17 Realisasi Anggaran TW IV .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi .....	4
Gambar 2 Peta Strategis SKIPM Pontianak 2024.....	8
Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK .....	11

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang pj Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Stasiun KIPM Pontianak. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Stasiun KIPM Pontianak serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Pontianak. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.2 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Unit Pelaksana Teknis, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Pontianak menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan

Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan

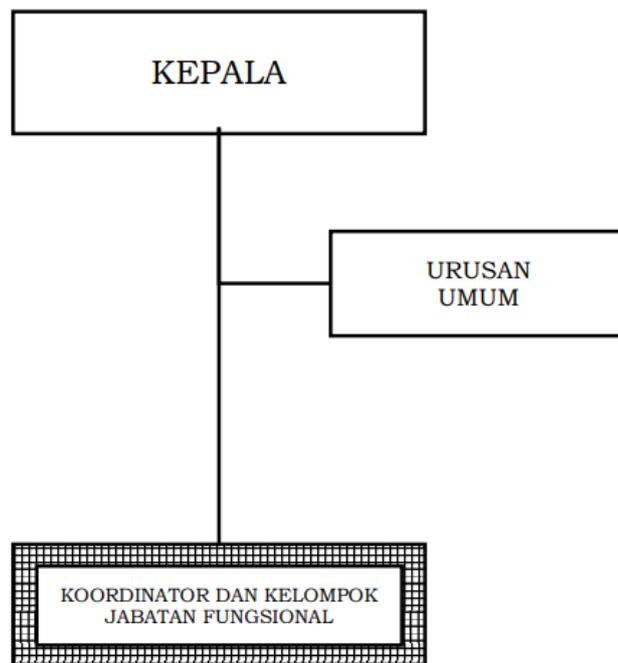
inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut SJMHKP adalah Upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutudan aman bagi Kesehatan manusia.

Salah satu fungsi utama BPPMHKP adalah pemberi Jaminan Kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemberian *Quality Assurance* terhadap industry dan perdagangan telah mendorong meningkatnya nilai tambah, daya saing, hilirisasi industri, pertumbuhan ekspor hasil kelautan dan perikanan dan investasi yang memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan pertauran Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa BPPMHKP merupakan unit Eselon I di Kementrian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Kegiatan pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMHKP) dilakukan bertujuan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan. Sesuai pasal 4 PERMEN KP No. 8 tahun 2024, menteri memberikana kewenangan kepada kepala Badan sebagai otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan dibidang perkarantinaan ikan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari : a) Urusan Umum dan; b) Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 1 Struktur Organisasi**

### 1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Pontianak disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Pontianak adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan

efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.

- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

#### **1.4 Sistematika Penyajian**

Sistematika dan penyajian LKJ Stasiun KIPM Pontianak Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

# PERENCANAAN KINERJA

## 2.1 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Pontianak tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2 Peta Strategis SKIPM Pontianak 2024

## 2.2 Indikator dan Target Kinerja

Pada Tahun 2024 Stasiun KIPM Pontianak mempunyai indikator dan target kinerja sebanyak 14, sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel. 1 Indikator dan Target Kinerja Stasiun KIPM Pontianak 2024**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>				
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
		3	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
		4	Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	99
<b>Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK.2	Terselenggaranya pengendalian dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar	5	Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji Dan Lembaga Inspeksi Lingkup Stasiun KIPM Pontianak (%)	70
<b>KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>				
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Indeks)	86
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	82
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	71
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	93,76
		11	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	80
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	80

## 2.3 Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. angka maksimum adalah 120;
2. angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
  - a. Polarisasi Maximize  
Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:  
**Indeks Capaian IKU =  $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$**
  - b. Polarisasi Minimize  
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:  
**Indeks Capaian IKU =  $\{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$**
  - c. Polarisasi Stabilize  
Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



HIAJU

$$100 \leq X \leq 120$$

(memenuhi ekspektasi)



KUNING

$$80 \leq X < 100$$

(Belum memenuhi ekspektasi)



MERAH

$$X < 80\%$$

(tidak memenuhi ekspektasi)

# AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,20 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).

Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Pontianak pada tahun 2024



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Pontianak Tahun 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>			
SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	100
	2 Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	100
	3 Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	100

		4	Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	99	100
<b>Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>					
SK.2	Terselenggaranya pengendalian dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar	5	Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji Dan Lembaga Inspeksi Lingkup Stasiun KIPM Pontianak (	70	83,10
<b>Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>					
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak	6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)	3,36	3,91
		7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Indeks)	86	83,06
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	82	83,7
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	71	91,39
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	93,76	92,5
		11	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	100	100
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	80	100
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT SKIPM Pontianak (%)	80	84,34
		14	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	80	97,5

## 3.2 Analisis dan Evaluasi

### *Kegiatan Pengendalian Mutu*

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.

### ***Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.***

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan adalah tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan lingkup UPT SKIPM Pontianak.

#### **IK 1. Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)

2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual

Pada Tahun 2024 TW IV, Untuk IK 1 yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di Targetkan sebesar 70 %, Untuk IK 1 ini sudah dilakukan sosialisasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Mempawah yang bertujuan untuk menjamin Keamanan pangan dan mutu produk perikanan Budidaya dan juga sudah dilakukan Kegiatan bimbingan teknis cara penanganan Ikan yang baik di atas kapal (CPIB) Kapal di Pontianak dan Pemangkat kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman kepada nelayan/ABK Kapal tentang cara penanganan ikan yang baik diatas kapal dan tentang cara penerbitan Sertifikasi cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas Kapal (CPIB) Kapal, untuk IK 1 yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak sudah terealisasi 100%

**Tabel. 3 Target dan Realisasi IK 1**

Indikator Kinerja	TW IV 2024	
	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	100

**IK 2 Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)**

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius)
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada Tahun 2024 TW IV, Untuk IK 2 yaitu Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 70 %. Untuk IK 2 pada tahun 2024 ini UPT SKIPM Pontianak sudah mengeluarkan 9 sertifikat HACCP produk pada triwulan 1 dan SKP pada triwulan IV, untuk IK 2 yaitu a Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak sudah terealisasi 100%.

Tabel. 4 Target dan Realisasi IK 2

Indikator Kinerja	TW IV 2024	
	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Hasil Kelautan Dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	100

### IK 3 Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan fokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Pada Tahun 2024 TW IV, Untuk IK 3 yaitu Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 70%, untuk IK 3 ini tidak dilakukan pengawasan

mutu tapi untuk data dukung menggunakan rekapitulasi hasil uji Pengambilan contoh di UPI dalam rangka Official Control di beberapa UPI yang terletak di beberapa Kabupaten, untuk IK 3 yaitu yaitu Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak sudah terealisasi 100 %

REKAPITULASI HASIL UJI PENGAMBILAN CONTOH DI UPI DALAM RANGKA *OFFICIAL CONTROL*

NAMA UPT KIPM : BPPMHKP Pontianak  
Laporan Triwulan/tahun : IV / 2024

NO	NAMA UPI	JENIS CONTOH	TANGGAL PENGAMBILAN CONTOH	TANGGAL LHU	JENIS PENGUJIAN				Lab. Pengujian	Keterangan
					ORGANOLEPTIK	MIKROBIOLOGI				
1	2	3	4	5	SCORE SHEET	TPC	E. coli	Salmonella		
1	Tjang Se Su	Udang Segar	01 Oktober 2024	07 Oktober 2024	8,0	1,5 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
2	Tjang Se Su	Tenggiri Segar	01 Oktober 2024	07 Oktober 2024	8,0	1,9 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
3	Tjang Se Su	Cumi-cumi Segar	01 Oktober 2024	07 Oktober 2024	8,0	2,4 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
4	PT.Pulaumas Khatulistiwa	Vaname Beku	06 November 2024	13 November 2024	8,0	9,8 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
5	PT.Pulaumas Khatulistiwa	Tenggiri Beku	06 November 2024	13 November 2024	8,0	1,3 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
6	PT.Pulaumas Khatulistiwa	Nila Beku	06 November 2024	13 November 2024	8,0	7,4 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
7	PT.Pulaumas Khatulistiwa	Betutu Beku	06 November 2024	13 November 2024	8,0	1,6 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
8	PT.Pulaumas Khatulistiwa	Cumi-cumi Beku	06 November 2024	13 November 2024	8,0	8,8 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
9	PT.Pulaumas Khatulistiwa	<i>Salted Jelly Fish</i>	06 November 2024	13 November 2024	8,0	1,1 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
10	PT.Pulaumas Khatulistiwa	Udang Red Beku	06 November 2024	13 November 2024	8,0	1,5 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
11	CV. Jesslyn Indah Lestari	Cumi-cumi Segar	11 November 2024	18 November 2024	8,0	1,1 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
12	CV. Jesslyn Indah Lestari	Tenggiri Segar	11 November 2024	18 November 2024	8,0	3,8 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
13	CV. Jesslyn Indah Lestari	Bawal Hitam Segar	11 November 2024	18 November 2024	8,0	4,1 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
14	CV. Jesslyn Indah Lestari	Udang Segar	11 November 2024	18 November 2024	8,0	2,4 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
15	CV. Jesslyn Indah Lestari	Rajungan Segar	11 November 2024	18 November 2024	8,0	1,2 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
16	CV. Robby Jaya	Udang Wangkang Segar	23 November 2024	29 November 2024	8,0	1,3 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
17	CV. Robby Jaya	Kakap Merah Segar	23 November 2024	29 November 2024	8,0	1,8 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
18	CV. Robby Jaya	Ikan Puput Segar	23 November 2024	29 November 2024	8,0	2 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
19	CV. Robby Jaya	Cumi-cumi Segar	23 November 2024	29 November 2024	8,0	7 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	
20	CV. Robby Jaya	Rajungan Segar	23 November 2024	29 November 2024	8,0	2 x 10*	<3	Negatif	BPPMHKP PONTIANAK	

Tabel. 5 Target Dan Realisasi IK 3

Indikator Kinerja	TW IV 2024	
	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	100

#### **IK 4 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada Tahun 2024 TW IV, Untuk IK 4 yaitu Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 99% pada tahun 2024 tidak ada penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan ke negara tujuan ekspor dengan jumlah sertifikat yang di terbitkan sebanyak 281 sertifikat, dikarenakan tidak ada penolakan untuk IK 4 yaitu Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak terealisasi 100%

Tabel. 6 Target dan Realisasi IK 4

Indikator Kinerja	TW IV 2024	
	Target (%)	Realisasi (%)
Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	99	100

### *Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan*

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar.

#### ***Sasaran Strategi 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar.***

Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar (Kegiatan Standarisasi dan Sistem Kepatuhan) lingkup UPT SKIPM Pontianak.

#### **IK 5 Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorim Penguji Dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)**

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar

sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:
  1. Ruang Lingkup
  2. Acuan Normatif
  3. Persyaratan Umum
  4. Persyaratan Struktural
  5. Persyaratan Sumber Daya
  6. Persyaratan Bebas
  7. Persyaratan Sistem Manajemen
- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi: b
  1. Persyaratan Umum
  2. Persyaratan Struktural
  3. Persyaratan Sumberdaya
  4. Persyaratan Proses
  5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Tahun 2024 TW IV, Untuk IK 5 Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorim Penguji Dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 70%, Untuk IK 5 ini sudah terealisasi sebesar 83,10% hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Manajemen Mutu dengan No: B. 32/BPPMHKP.2/TU.210/I/2025, tentang Penyampain Capaian IKU Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga inpeksi Lingkup UPT BPP2MHKP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

Nomor : B.32/BPPMHKP.2/TU.210/I/2025 10 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Capaian IKU Sistem  
Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan  
Lembaga Inspeksi lingkup UPT BPPMHKP

Yth. Seluruh Kepala UPT BPPMHKP

Sehubungan telah selesainya kegiatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja utama terkait nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup UPT BPPMHKP, sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar **81,35** didapatkan dari 13 laboratorium;
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar **84,85** didapatkan dari 14 lembaga inspeksi;
3. Berdasarkan data pada poin 1 dan poin 2 maka capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP sebesar **83,10**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Manajemen Mutu



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

1. Kepala Badan Penegndalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Badan Penegndalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tabel. 7 Target dan Realisasi IK 5

Indikator Kinerja	TW IV 2024	
	Target (%)	Realisasi (%)
Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorim Penguji Dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	70	83,10

## IK 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: [https://ptsp.kkp.go.id/skm/login\\_Aplikasi](https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi) yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa di masing-masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pada Tahun 2024 TW IV, Untuk IK 6 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks) di targetkan sebesar 3,36 dan sudah terealisasi sebesar 3,91 yang diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner UPT SKIPM Pontianak dengan jumlah koresponden sebanyak 60 koresponden.

Tabel. 8 Target dan Realisasi IK 6

Indikator Kinerja	TW IV 2024	
	Target (%)	Realisasi (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks)	3,36	3,91

### *Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM*

Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak.

### ***Sasaran Strategis 3. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak.***

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BKIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak.

### **IK 7 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak Indeks)**

Indeks Profesionalitas ASN adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi (Renstra BKN 2015– 2019). Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan, ketatalaksanaan, profesionalitas ASN. Peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu didorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembinaan ASN diarahkan pada tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi agar tercapai tujuan pembangunan secara nasional. Dengan profesionalisme ASN diharapkan setiap organisasi pemerintahan dapat berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi dan visinya. Optimalisasi standar kinerja sangat diharapkan oleh organisasi maupun

para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat guna mendapatkan pelayanan yang baik sejalan dengan prinsip good governance. Pengukuran indeks profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen (Sutiadi, 2016: 56). Pengukuran indikator outcome dengan menggunakan composite index sangat umum digunakan oleh para perencana dan evaluator. Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program. Penyusunan indikator indeks sangat bergantung pada kekuatan teori atas tujuan yang hendak dicapai. Pemilihan indikator berdasarkan teori yang dibangun akan menyempurnakan indeks, sehingga akan lebih mendekati kesesuaian. Semakin banyak komponen output yang tersedia, maka akan semakin mendekati penilaian pada kondisi yang sesungguhnya.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan yang tercemin melalui perilaku sehari-hari. Kemampuan menunjukkan potensi dalam melaksanakan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indek profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut

$$IdxPro = koef(1 - gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta \frac{SI(inex)}{S1}) + Koef(1 - inDiscpl)$$

Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten  
 Kj : Angka SKP  
 $\delta S1$  : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%), inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin. Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidaktersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai

dengan harapan. Ketidakterediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan. Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidakterediaan data yang parsial dapat juga menjadikan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliable karena terdapat data yang tidak terisi. Hal ini karena nilai yang diperoleh merupakan kekosongan angka yang telah dikalikan dengan angka koefisien yang telah ditetapkan. Akibatnya, hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Berdasarkan teori yang dikembangkan bahwa indeks profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, gaji, dan disiplin. Premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin meningkat, penghasilannya semakin baik, dan disiplin pegawai yang tinggi. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat didekati

dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarannya semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas. Pada Triwulan III tidak ditargetkan dan belum terealisasi.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pada Tahun 2024 TW IV, Untuk IK 7 yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Indeks) ditargetkan sebesar 86, untuk IK 7 ini belum terealisasi sesuai dengan indeks yang telah di target karena nilai indeks yang dicapai sebesar 83,06 tapi dengan nilai indeks sudah mendapatkan predikat baik.

No	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Realisasi (Absolut)	Realisasi (%)	Realisasi (Absolut)	Realisasi (%)	Realisasi (Absolut)	Status		
16	BALAI KIPM SEMARANG	29	21,17	84,68 %	37,69	94,22 %	24,66	82,2 %	5	100 %	88,52	TINGGI
17	BALAI KIPM BANJARMASIN	13	20,54	82,16 %	40	100 %	25	83,33 %	5	100 %	90,54	TINGGI
18	BALAI KIPM LAMPUNG	28	21,11	84,44 %	36,19	90,47 %	25	83,33 %	5	100 %	87,29	TINGGI
19	BALAI KIPM AMBON	11	20,82	83,28 %	38,48	96,2 %	25	83,33 %	5	100 %	89,3	TINGGI
20	BALAI KIPM ENTIKONG	6	20,67	82,68 %	35,42	88,55 %	25	83,33 %	5	100 %	86,08	TINGGI
21	BALAI KIPM TANJUNGPINANG	10	20,6	82,4 %	36,64	91,6 %	25	83,33 %	5	100 %	87,24	TINGGI
22	BALAI KIPM TARAKAN	14	20,36	81,44 %	38,24	95,6 %	25	83,33 %	5	100 %	88,6	TINGGI
23	STASIUN KIPM PALEMBANG	21	21,19	84,76 %	38,06	95,15 %	25,24	84,13 %	5	100 %	89,49	TINGGI
24	STASIUN KIPM BANDUNG	9	21,22	84,88 %	37,22	93,05 %	28,33	94,43 %	5	100 %	91,78	SANGAT TINGGI
25	STASIUN KIPM MERAUKE	12	20,17	80,68 %	35,94	89,85 %	25	83,33 %	5	100 %	86,1	TINGGI
26	STASIUN KIPM PONTIANAK	16	20,56	82,24 %	35,62	89,05 %	21,88	72,83 %	5	100 %	83,06	TINGGI
27	STASIUN KIPM KENDARI	12	20,83	83,32 %	40	100 %	25	83,33 %	5	100 %	90,83	TINGGI
28	STASIUN KIPM BATAM	7	21,57	86,28 %	40	100 %	25	83,33 %	5	100 %	91,57	SANGAT TINGGI
29	STASIUN KIPM PADANG	12	19,67	78,68 %	37,92	94,8 %	25	83,33 %	5	100 %	87,58	TINGGI
30	STASIUN KIPM JAMBI	14	21,07	84,28 %	36,64	91,6 %	25,36	84,53 %	5	100 %	88,07	TINGGI

Tabel. 9 Target dan Realisasi IK 7

Indikator Kinerja	Realisasi					TW IV 2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi
Indeks Profesionalitas ASN Pusat Karantina Iklan Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Indeks)	-	72	83	86,13	-	86	83,06

### IK 8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level

Il merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Pada Tahun 2024 IK 8 yaitu Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) di targetkan sebesar 82 dan sudah terealisasi sebesar 83,70.

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
1	Sekretariat BPPMHKP	24.00	24.00	13.80	22.50	84.30	A
2	Pusat Manajemen Mutu	24.90	24.90	13.50	20.00	83.30	A
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
4	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
5	BBKIPM Jakarta I	22.80	24.00	13.50	22.50	82.80	A
6	BBKIPM Makassar	25.50	25.50	12.30	20.50	83.80	A
7	BKIPM Denpasar	24.00	23.10	13.50	22.50	83.10	A
8	BKIPM Surabaya I	24.00	22.20	13.50	22.50	82.20	A
9	BKIPM Medan I	22.20	24.00	13.50	22.50	82.20	A
10	BKIPM Balikpapan	24.00	24.00	12.75	21.25	82.00	A
11	BKIPM Jayapura	22.50	23.70	12.00	16.00	74.20	BB
12	BKIPM Jakarta II	23.70	23.70	13.50	21.25	82.15	A
13	BKIPM Surabaya II	24.00	25.50	11.10	22.50	83.10	A
14	BKIPM Mataram	24.00	27.00	12.60	20.00	83.60	A
15	BKIPM Manado	24.90	24.00	12.00	22.50	83.40	A
16	BKIPM Semarang	27.00	24.00	12.00	21.25	84.25	A
17	BKIPM Banjarmasin	23.10	24.30	13.50	22.50	83.40	A
18	BKIPM Lampung	22.20	27.00	13.50	20.00	82.70	A
19	BKIPM Ambon	27.00	24.00	12.75	20.00	83.75	A
20	BKIPM Entikong	22.20	24.60	13.50	22.50	82.80	A
21	BKIPM Tanjung Pinang	22.20	24.00	10.35	21.00	77.55	BB
22	BKIPM Tarakan	24.00	24.00	12.00	22.50	82.50	A
23	BUSKI PM	24.00	27.00	13.50	20.00	84.50	A
24	SKIPM Palembang	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
25	SKIPM Bandung	26.10	25.20	12.60	19.75	83.65	A
26	SKIPM Merauke	23.70	23.70	11.10	18.75	77.25	BB
27	SKIPM Pontianak	22.20	25.50	13.50	22.50	83.70	A
28	SKIPM Kendari	24.00	23.70	13.05	20.25	81.00	A
29	SKIPM Batam	25.50	25.50	10.35	21.00	82.35	A
30	SKIPM Padang	19.80	27.00	13.50	22.50	82.80	A
31	SKIPM Jambi	24.00	25.50	12.60	21.25	83.35	A
32	SKIPM Palu	24.00	24.00	12.60	22.50	83.10	A
33	SKIPM Palangkaraya	24.00	24.00	12.30	22.50	82.80	A
34	SKIPM Kupang	24.00	25.50	11.40	22.50	83.40	A
35	SKIPM Pangkal Pinang	24.00	25.50	11.40	21.25	82.15	A
36	SKIPM Ternate	22.20	27.00	12.60	22.50	84.30	A
37	SKIPM Yogyakarta	26.10	24.60	11.85	20.50	83.05	A
38	SKIPM Aceh	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
39	SKIPM Gorontalo	24.60	24.00	12.75	21.25	82.60	A
40	SKIPM Pekanbaru	22.80	27.00	12.60	22.50	84.90	A
41	SKIPM Medan II	25.20	24.00	12.60	22.50	84.30	A

Tabel. 10 Target dan Realisasi IK 8

Indikator Kinerja	Realisasi					TW IV 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT SKIPM Pontianak (Nilai)	-	-	93	91,23	-	82	83,7	-	82	-

## **IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)**

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Persentase tindak lanjut atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern.

Pada Tahun 2024 IK 9 yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) ditargetkan sebesar 71 dan sudah terealisasi sebesar 91,39.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	007538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	91,39	100,00	100,00	42,60	

**Tabel. 11 Target dan Realisasi IK 9**

Indikator Kinerja	TW IV 2024	
	Target (%)	Realisasi ( Nilai)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	71	91,39

### **IK 10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)**

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

**Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain**

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- Baik, apabila  $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ ;
- Cukup, apabila  $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ ; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA  $>$

Pada Tahun 2024 IK 10 yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai) di targetkan sebesar 93,76 dan belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan karena nilai yang dicapai sebesar 92,50.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I PONTIANAK

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	75.12	90.34	0.00	0.00	96.66	100.00	74.00	80%	0.00	92.50
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.27	18.07	0.00	0.00	9.67	25.00				
					Nilai Aspek	87.56		93.50			100.00					

Tabel. 12 Target dan Realisasi IK 10

Indikator Kinerja	Realisasi					TW IV 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (Nilai)	-					93,76	92,50	-	93,76	-

### IK 11 Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada Tahun 2024 IK 11 yaitu Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 100 %, untuk IK 11 sudah terealisasi 100%.

Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Keuangan LK 2023 Lingkup KKP per 28 September 2024

No	Eselon I	Nilai Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Setjen	571,218,613.00	631,793,931,033.00	0.0904%
2	Ditjen PKRL	175,999,847.00	399,297,824,951.00	0.0441%
3	Ditjen PSDKP	1,118,316,959.00	1,119,216,743,475.00	0.0999%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	568,110,399.00	842,679,861,445.00	0.0674%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	647,733,195.00	1,087,136,906,277.00	0.0596%
6	BPPSDMKP	1,832,712,563.00	1,342,845,268,762.00	0.1365%
7	Ditjen PDSPKP	998,491,792.00	339,604,537,406.00	0.2940%
8	BPPMHKP	11,350,000.00	497,626,943,467.00	0.0023%
9	Itjen	23,878,250.00	75,393,908,501.00	0.0317%
	<b>Jumlah</b>	<b>5,947,811,618.00</b>	<b>6,335,595,925,317.00</b>	<b>0.0939%</b>

Tabel. 13 Target dan Realisasi IK 11

Indikator Kinerja	Realisasi					TW IV 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	-					100	100		100	-

**IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

## CARA PENGUKURAN

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

$\sum N_t$  : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$  : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan.

Pada Tahun 2024 IK 12 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) ditargetkan sebesar 80 % berdasarkan data Sidak Itjen, menunjukkan bahwa UPT SKIPM Pontianak pada tahun 2024 telah menuntaskan 100% perbaikan.

Tabel. 14 Target dan Realisasi IK 12

Indikator Kinerja	Realisasi					TW IV 2024			Resnstra 2020-2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	-	94,21	86,34	84,76	-	80	100	-	80	-

## IK 13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Pada Tahun 2024 IK 13 yaitu Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 80% yang di hitung secara tahunan untuk tahun 2024 sudah tercapai 84,34%.

2. Penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar **84,34%** dari maksimum 100%. Nilai tersebut telah melebihi target pada PK BPPMHKP Tahun 2024, yaitu pada IK 28, dengan target 80%. Rincian penilaian kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis BPPMHKP	10	10,00
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	13,75
3	Persentase Pemilihan PBJ yang Dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	10	10,00
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	31,84
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6	Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada Triwulan I s.d. III Tahun 2023	15	15,00
<b>Hasil Penilaian</b>		<b>100</b>	<b>84,34</b>

Tabel. 15 Target dan Realisasi IK 13

Indikator Kinerja	Realisasi					TW III 2023			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	-	-	-	-	76,21	80	84,34	-	80	-

**IK 14**

**Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)**

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup UPT BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2017-2021 (20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%)

Pada Tahun 2024 IK 14 yaitu Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%) di targetkan sebesar 80 % yang di hitung secara tahunan untuk tahun 2024 sudah tercapai 97,50 %.

Lampiran I  
 Nomor : B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025  
 Tanggal : 31 Desember 2024

**Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker lingkup BPPMHKP Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Pusat Manajemen Mutu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
2	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	80,00 %	97,50 %	Tercapai
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	80,00 %	97,50 %	Tercapai
4	Balai KIPM Jakarta II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
5	Balai Uji Standar KIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
6	Sekretariat BKIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Bandung	80,00 %	97,50 %	Tercapai
8	Stasiun KIPM Cirebon	80,00 %	97,50 %	Tercapai
9	Balai KIPM Semarang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Yogyakarta	80,00 %	97,50 %	Tercapai
11	Balai KIPM Surabaya I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
12	Balai KIPM Surabaya II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
13	Stasiun KIPM Aceh	80,00 %	97,50 %	Tercapai
14	Balai KIPM Medan I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
15	Stasiun KIPM Medan II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
16	Stasiun KIPM Tj. Balai Asahan	80,00 %	97,50 %	Tercapai
17	Stasiun KIPM Padang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
18	Stasiun KIPM Pekanbaru	80,00 %	97,50 %	Tercapai
19	Stasiun KIPM Jambi	80,00 %	97,50 %	Tercapai
20	Stasiun KIPM Palembang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
21	Balai KIPM Lampung	80,00 %	97,50 %	Tercapai
22	Stasiun KIPM Pontianak	80,00 %	97,50 %	Tercapai
23	Balai KIPM Entikong	80,00 %	97,50 %	Tercapai
24	Stasiun KIPM Palangkaraya	80,00 %	97,50 %	Tercapai
25	Balai KIPM Banjarmasin	80,00 %	97,50 %	Tercapai
26	Balai KIPM Balikpapan	80,00 %	97,50 %	Tercapai
27	Balai KIPM Manado	80,00 %	97,50 %	Tercapai
28	Stasiun KIPM Tahuna	80,00 %	97,50 %	Tercapai
29	Stasiun KIPM Palu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
30	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	80,00 %	97,50 %	Tercapai
31	Balai Besar KIPM Makasar	80,00 %	97,50 %	Tercapai
32	Stasiun KIPM Kendari	80,00 %	97,50 %	Tercapai
33	Stasiun KIPM Bau-bau	80,00 %	97,50 %	Tercapai
34	Balai KIPM Ambon	80,00 %	97,50 %	Tercapai
35	Balai KIPM Denpasar	80,00 %	97,50 %	Tercapai
36	Balai KIPM Mataram	80,00 %	97,50 %	Tercapai
37	Stasiun KIPM Bima	80,00 %	97,50 %	Tercapai
38	Stasiun KIPM Kupang	80,00 %	97,50 %	Tercapai

**Tabel. 16 Target dan Realisasi IK 14**

Indikator Kinerja	Realisasi					TW III 2024			Resnstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Target	%
Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Pontianak (%)	-	-	-	-	100	80	97,5	-	80	-

## 3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SKIPM Pontianak pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah sebesar Rp. 5,360,933,000. Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Pontianak pada tahun 2024 baru sebesar Rp. 5,185,856,523 atau sebesar 96.73 %.

**Tabel. 5 Realisasi Anggaran TW IV**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I PONTIANAK

**PAGU DAN REALISASI BELANJA**

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	032-567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	042	PAGU	2,803,855,000	2,557,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360,933,000
				REALISASI	2,688,060,723	2,497,795,800	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,185,856,523	
				PERSENTASE	(95.87%)	(97.68%)								(96.73%)	
				SISA	115,794,277	59,282,200	0	0	0	0	0	0	0	175,076,477	
				TOTAL	2,803,855,000	2,557,078,000	0	0	0	0	0	0	0	5,360,933,000	
				REALISASI	2,688,060,723	2,497,795,800	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	5,185,856,523	
				PERSENTASE	(95.87%)	(97.68%)								(96.73%)	
				SISA	115,794,277	59,282,200	0	0	0	0	0	0	0	175,076,477	

**Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)**

## Penutup

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja UPT Stasiun KIPM Pontianak Tahun 2024 menyajikan keberhasilan kegagalan capaian sasaran kinerja UPT Stasiun KIPM Pontianak pada tahun 2024, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja SKIPM Pontianak pada Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,20 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Dari 14 Indikator Kinerja terdapat 11 (78,6%) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target 1 ( 7,14%) Indikator kinerja sesuai target dan 2 (14,28) Indikator kinerja yang dibawah target.

## 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Pontianak pada tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan, triwulan, semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.
- Mengingat Indikator Kinerja terkait dengan IP ASN, ditargetkan per semester, agar pemenuhan aspek-aspek IP ASN Pegawai lebih ditingkatkan, agar hasilnya dapat sesuai target.